KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

80NTFEZ5

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

The state of the s									
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 N	A.1 NPWP : 58 871 982 3 722 000								
A.2 NIK :									
A.3 Nama : SISKA AYU YULIASARI									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7		
1 21-402-01			5.138.000	5.138.000	0	5	256.900		
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal Z 5 dd D 2 mm Z 0 2 Z yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah : C.3 ID Subunit Organisasi :			9 5 RUMA	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.4	4 Tanggal :		2 6	dd 0 1 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5	Nama Penandatangan : HAR		HARI	IUMADI					
				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	κ mengatur bahwa α	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	